

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Adapun fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kepariwisata. Salah satunya Pariwisata tempat karaoke, dimana tempat karaoke sendiri masih menjadi stigma negatif di kalangan masyarakat yang berada di Kabupaten Pati. Sehubungan dengan hal itu tempat karaoke yang ada di Kabupaten Pati menjadi tempat wisata karaoke yang terkesan buruk, padahal masih banyak usaha tempat karaoke yang sudah menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Pati. Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pati mengenai penyelenggaraan tempat karaoke dan apa saja hambatanannya.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Adapun Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka, wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata pada jenis usaha tempat karaoke di Kabupaten Pati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati memiliki 4 komisi salah satunya Komisi Hukum dan Pemerintahan sebagai komisi yang memiliki peran dalam menjalankan Fungsi pengawasan Terhadap Tempat Karaoke di Kabupaten Pati. DPRD juga melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pariwisata, Pelaku Usaha Tempat Karaoke Serta menyerap aspirasi Masyarakat di Kabupaten Pati. Disisi lain, terdapat hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pati mengenai penyelenggaraan tempat karaoke yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum serta adanya kecenderungan dari pelaku usaha mencari celah untuk dapat menghindari aturan hukum agar pelaku usaha tersebut tetap dapat menjalankan usaha tempat karaoke. Pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan harus dapat mendorong pemerintah daerah untuk secara konsisten menjalankan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari tujuan dari terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pati, sehingga semua unsur pemerintahan harus aktif terlibat dan konsisten menjalankan Peraturan Daerah ini.

Kata Kunci: Implementasi, Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tempat Karaoke, Kabupaten Pati